

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP OPTIMALISASI PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017-2021**

Nurajijah

Akademi Akuntansi Bandung
joyanurajijah.10@gmail.com

Fatwa Rubiar Rachman

Akademi Akuntansi Bandung
fatwa.rubiarrachman@gmail.com

Imam Dzulfiqar

Akademi Akuntansi Bandung
imamdzulfiqar@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims to find out how much influence the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) has on regional original income (PAD) in the City of Bandung. Based on target data and the realization of the effectiveness and contribution of regional taxes to Bandung City's original regional income, there is a decrease in the realization of achievements from year to year. This is influenced by less than optimal land and building tax collection in the urban and rural sectors. The data processing is based on the realization of land and building tax targets as well as regional original income data with an observation period from 2017 to 2021 and secondary data in the form of monthly data for 5 years. The results show that the average contribution of land and building tax to local revenue only produces a ratio of 16%. From the results of hypothesis testing, there is a significant influence between PBB-P2 and the Bandung City PAD.

Keywords: *PBB-P2, Bandung City PAD*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung. Berdasarkan data target dan realisasi efektifitas dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, terdapat penurunan realisasi pencapaian dari tahun ke tahun, hal tersebut dipengaruhi oleh pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan yang kurang optimal. Adapun pengolahan data dari realisasi target pajak bumi dan bangunan serta data pendapatan asli daerah dengan periode pengamatan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan jenis data sekunder berupa data perbulan selama 5 tahun. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah hanya menghasilkan rasio sebesar

16%. Dari hasil pengujian hipotesis, terdapat pengaruh yang signifikan antara PBB-P2 terhadap variabel PAD Kota Bandung.

Kata kunci: PBB-P2, PAD Kota Bandung

PENDAHULUAN

Dalam rangka evaluasi untuk menangani kondisi perekonomian negara, pemerintah pusat tentunya mengupayakan agar masalah ekonomi tersebut dapat ditangani dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatannya. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan, memberikan kebebasan dan kemajuan daerah yang mana secara tidak langsung pemberlakuan otonomi daerah disetiap daerahnya masing-masing, lewat kewenangan ini maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan pemasukan atau pendapatannya dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah Kota Bandung sendiri merupakan kota yang terbilang pertumbuhan ekonominya cukup pesat, hal ini dikarenakan Kota Bandung termasuk kota industri dan terdapat banyak sekali bangunan-bangunan, baik itu bangunan rumah warga, bangunan pabrik maupun bangunan-bangunan lainnya. Dari banyaknya bangunan-bangunan tersebut yang ada di Kota Bandung dapat dipungut pajak bumi dan bangunan perdesaan atau perkotaan. Dengan banyaknya pendapatan yang diperoleh maka semakin banyak pembangunan yang bisa direncanakan serta pencapaian target pendapatan asli daerah meningkat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. Meningkatnya jumlah pajak bumi dan bangunan maka akan mendorong terjadinya peningkatan pendapatan terhadap suatu daerah.

Tabel 1 Target dan Realisasi PBB-P2 di Kota Bandung Tahun 2017-2021

| No | Tahun | Target | Realisasi |
|-----------|--------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2017 | 578,500,000,000 | 273,904,365,722 |
| 2 | 2018 | 700,500,000,000 | 552,686,400,078 |
| 3 | 2019 | 630,000,000,000 | 558,242,627,008 |
| 4 | 2020 | 500,000,000,000 | 505,193,534,229 |
| 5 | 2021 | 500,000,000,000 | 509,056,381,743 |

Sumber: BAPENDA Kota Bandung

Tabel 2 Target dan Realisasi PAD di Kota Bandung Tahun 2017-2021

| No | Tahun | Target | Realisasi |
|----|-------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2017 | 3,015,836,590,302 | 2,578,457,420,885 |
| 2 | 2018 | 3,397,309,517,811 | 2,571,591,786,199 |
| 3 | 2019 | 3,252,540,610,057 | 2,548,258,990,275 |
| 4 | 2020 | 2,264,814,094,039 | 2,063,783,773,735 |
| 5 | 2021 | 2,409,804,328,188 | 2,195,971,884,100 |

Sumber: BKAD Kota Bandung

TELAAH LITERATUR

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No. 6 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah: “Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.” Dasar pengenaan PBB P-2 adalah Nilai Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, oleh kepala kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas Nama Menteri keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/ Bupati/ Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui:

1. Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis.
2. Nilai perolehan baru.
3. Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tarif tersebut paling tinggi 0,3%, dengan NJOPTKP minimal sebesar Rp. 10.000.000,- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa formula perhitungan PBB-P2 adalah:

$$= \text{Tarif (NKOP-NJOPTKP)}$$

Indikator penerimaan pajak bumi dan bangunan yang digunakan adalah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan rumus rasio efektifitas. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat menghitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)}}{\text{Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)}} \times 100\%$$

Sumber: Oktaviani, M & Latif, D.V (2022)

Menganalisis efektivitas yang diperoleh berdasarkan kriteria efektivitas dengan pedoman pada tabel interpretasi nilai efektivitas, sebagai berikut:

Tabel 3 Pedoman Interpretasi Efektifitas

| Presentase | Kriteria |
|-------------------|-----------------|
| > 100% | Sangat Efektif |
| 90% - 100% | Efektif |
| 80% - 90% | Cukup Efektif |
| 60% - 80% | Kurang Efektif |
| < 60% | Tidak Efektif |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi merupakan sesuatu yang disumbangkan yang dikeluarkan oleh individu atau sekelompok orang dalam upaya membantu mengatasi kekurangan dalam suatu hal yang diperlukan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya kontribusi dapat mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Untuk menghitung kontribusi dalam pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Oktaviani, M & Latif, D.V (2022)

Menganalisis kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah, maka digunakan indikator pada tabel dibawah ini:

Tabel 4 Pedoman Interpretasi Kontribusi

| Presentasi (%) | Kriteria |
|-----------------------|-----------------|
| 0,00% – 10% | Sangat Kurang |
| 10,10% – 20% | Kurang |
| 20,10% – 30% | Sedang |
| 30,10% – 40% | Cukup Baik |
| 40,10% – 50% | Baik |
| > 50% | Sangat Baik |

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM

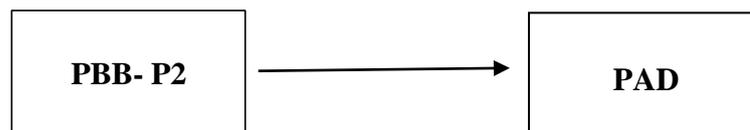
Pengaruh Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan terlaksananya pembangunan di daerah, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dimana sumber pendapatan tersebut menjadi salah satu cara memberdayakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka menjukan tingginya tingkat kemandirian suatu daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan metode verifikatif dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan metode verifikatif menurut Sugiyono (2018), adalah penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis Penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil data dari objek penelitian dan melihat langsung keadaan instansi pemerintah. Dalam penelitian lapangan dilakukan dengan mereview dokumen atau data yang diberikan langsung oleh pegawai badan pendapatan asli daerah Kota Bandung dan memberikan sedikit pertanyaan terkait pemungutan pajak daerah yang ada di Kota Bandung.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Deskriptif

Tabel 5 Data Efektifitas PBB-P2 (Dalam Bulan)

| BULAN | RASIO | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| JANURARI | 2% | 7% | 7% | 9% | 12% |
| FEBRUARI | 2% | 9% | 10% | 9% | 10% |
| MARET | 4% | 7% | 24% | 4% | 10% |
| APRIL | 9% | 34% | 40% | 3% | 25% |
| MEI | 16% | 49% | 55% | 16% | 35% |
| JUNI | 21% | 32% | 48% | 128% | 85% |
| JULI | 31% | 155% | 115% | 113% | 73% |
| AGUSTUS | 54% | 496% | 208% | 135% | 206% |
| SEPTEMBER | 98% | 80% | 429% | 230% | 559% |
| OKTOBER | 107% | 26% | 69% | 416% | 78% |
| NOVEMBER | 111% | 20% | 29% | 76% | 53% |
| DESEMBER | 113% | 34% | 29% | 74% | 75% |
| MAX | 113% | 496% | 429% | 416% | 559% |
| MIN | 2% | 7% | 7% | 3% | 10% |
| RATA-RATA | 47% | 79% | 89% | 101% | 102% |
| TOTAL RATA-RATA | 84% | | KRITERIA TOTAL | Cukup Efektif | |
| KRITERIA | Tidak Efektif | Kurang Efektif | Cukup Efektif | Sangat Efektif | Sangat Efektif |

Sumber: Pengolahan Data Oleh Peneliti 2023

Dari tabel diatas pengolahan data efektivitas PBB-P2 tersebut pada tahun 2017 menunjukkan rasio yang paling rendah yaitu pada bulan Januari-Februari sebesar 2% dengan kriteria tidak efektif, dan yang paling tinggi di tahun 2017 yaitu pada bulan Desember sebesar 113% dengan kriteria sangat efektif, adapun nilai rata-rata tahun 2017 sebesar 47% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2018 nilai rasio yang paling rendah yaitu pada bulan Januari dan Maret sebesar 7%, dan nilai rasio yang paling tinggi tahun 2018 pada bulan Agustus sebesar 496% dengan kriteria sangat efektif, adapun nilai rasio rata-rata pada tahun 2018 sebesar 79% dengan kriteria kurang efektif. Kemudian nilai rasio pada tahun 2019 yaitu di bulan Januari sebesar 7% dengan kriteria tidak efektif, nilai rasio paling tinggi pada bulan September dengan rasio 429% interval sangat efektif dan rata-rata rasio pada tahun 2019 sebesar 89% dengan kriteria cukup efektif. Tahun 2020 nilai paling rendah dialami pada bulan April sebesar 3% dengan kriteria tidak efektif, nilai paling tinggi dialami pada bulan Oktober sebesar 416% dengan kriteria sangat efektif adapun nilai rata-rata sebesar 101% dengan kriteria sangat

efektif. Tahun terakhir 2021 nilai paling rendah pada bulan Februari dan Maret dengan interval tidak efektif dan nilai paling tinggi pada bulan September sebesar 559% dengan kriteria sangat efektif, adapun nilai rata-rata pada tahun 2021 sebesar 102% dengan rasio sangat efektif.

Tabel 6 Kontribusi PAD (Dalam Bulan)

| BULAN | RASIO | | | | |
|-----------------|---------------|--------|----------|--------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| JANUARI | 1% | 2% | 2% | 2% | 5% |
| FEBRUARI | 1% | 3% | 3% | 2% | 4% |
| MARET | 1% | 3% | 8% | 1% | 3% |
| APRIL | 2% | 11% | 11% | 1% | 7% |
| MEI | 4% | 15% | 15% | 8% | 12% |
| JUNI | 5% | 12% | 16% | 35% | 17% |
| JULI | 8% | 36% | 24% | 25% | 22% |
| AGUSTUS | 9% | 64% | 40% | 36% | 44% |
| SEPTEMBER | 13% | 20% | 59% | 44% | 65% |
| OKTOBER | 23% | 8% | 18% | 60% | 18% |
| NOVEMBER | 24% | 6% | 8% | 19% | 12% |
| DESEMBER | 17% | 9% | 7% | 14% | 10% |
| MAX | 24% | 64% | 59% | 60% | 65% |
| MIN | 1% | 2% | 2% | 1% | 3% |
| RATA-RATA | 9% | 16% | 18% | 21% | 18% |
| TOTAL RATA-RATA | 16% | | KRITERIA | Kurang | |
| KRITERIA | Sangat Kurang | Kurang | Kurang | Sedang | Kurang |

Sumber: Pengolahan Data Oleh Peneliti, 2023

Dari tabel diatas pengolahan data kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pajak bumi dan bangunan pada sektor pedesaan dan perkotaan tersebut pada tahun 2017 menunjukkan rasio yang paling rendah yaitu pada bulan Januari-Maret sebesar 1% dengan kriteria sangat kurang, dan yang paling tinggi di tahun 2017 yaitu pada bulan November sebesar 24% dengan kriteria kurang, adapun nilai rata-rata tahun 2017 sebesar 9% dengan kriteria kurang. Pada tahun 2018 nilai rasio yang paling rendah yaitu pada bulan Januari sebesar 2% dengan kriteria sangat kurang, dan nilai rasio yang paling tinggi tahun 2018 pada bulan Agustus sebesar 64% dengan kriteria sangat baik, adapun nilai rasio rata-rata pada tahun 2018 sebesar 16% dengan kriteria kurang. Kemudian nilai rasio yang paling rendah pada tahun 2019 yaitu di bulan Januari sebesar 2% dengan kriteria kurang, nilai rasio paling tinggi pada bulan September dengan rasio 59% dengan kriteria sangat baik dan rata-rata rasio pada tahun 2019 sebesar 18% dengan kriteria kurang. Tahun 2020 nilai paling rendah dialami pada bulan Maret dan April

sebesar 1% dengan kriteria sangat kurang, nilai paling tinggi dialami pada bulan Oktober sebesar 60% dengan kriteria sangat baik, adapun nilai rata-rata sebesar 21% dengan kriteria sedang. Tahun terakhir 2021 nilai paling rendah pada bulan Maret sebesar 3% dengan interval sangat kurang, dan nilai paling tinggi pada bulan September sebesar 65% dengan interval sangat baik, adapun nilai rata-rata pada tahun 2021 sebesar 18% dengan rasio kurang.

Hasil Analisis Verifikatif

Analisis Regresi Linier

Tabel 7 Hasil Uji Regresi

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -1.547 | 0.038 | | -40.670 | 0.000 |
| | PBB-P2 | 0.829 | 0.023 | 0.979 | 36.737 | 0.000 |

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data olah SPSS 2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, diperoleh bentuk persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = -1,547 + 0,829X + e$$

Analisis dari persamaan regresi diatas adalah:

1. Nilai konstanta bertanda negatif, artinya apabila variabel independen (PBB-P2) sama dengan nol (0) maka kontribusi terhadap variabel dependen (PAD) sebesar -1,547.
2. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) memiliki koefisien korelas sederhana positif sebesar 0,829. Hal ini berarti apabila nilai Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) meningkat sebesar satu satuan dengan variabel-variabel lain tetap, maka akan meningkat skor Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,829. Jadi semakin tinggi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) semakin meningkat pula Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.

Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Korelasi

| Correlations | | | |
|--------------|---------------------|----------------|-------------|
| | | Profitabilitas | Harga Saham |
| PBB-P2 | Pearson Correlation | 1 | .979** |
| | Sig. (2-tailed) | | 0.000 |
| | N | 60 | 60 |
| PAD | Pearson Correlation | .979** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | 0.000 | |
| | N | 60 | 60 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data olah SPSS 2023

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui hasil korelasi bahwa koefisien Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (X) dan Pendapatan Asli Daerah (Y) memiliki nilai positif yaitu sebesar 0,979 yang artinya kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah dengan kriteria korelasi sangat kuat. Dengan kata lain jika variabel PBB-P2 mengalami peningkatan maka variabel PAD juga akan mengalami peningkatan juga.

Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 9 Hasil Uji Determinasi

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .979 ^a | 0.959 | 0.958 | 0.23772 |

a. Predictors: (Constant), PBB-P2

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data olah SPSS 2023

Perhitungan nilai koefisien determinasi dapat diketahui sebagai berikut:

$$Kd = 0,9792 \times 100\% = 95,8\%$$

Berdasarkan hasil pengujian determinasi pada tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi pada nilai *R Square* sebesar 0,959 atau 95,9%. Nilai tersebut artinya variabel pajak bumi dan bangunan psektor pedesaan dan perkotaan dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh sebesar 95,9%, sisanya 4,1% (100%-95,9%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hipotesis penelitian mana yang diterima dan mana yang ditolak. Nilai t tabel untuk penelitian dengan jumlah sampel 48 dan taraf nyata 5% dengan $df = N-2$ adalah 2,013 ($t_{tabel} = 2,012896$)

Tabel 10 Hasil Uji t

| Coefficients ^a | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------------------|---------|-------|
| Model | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | Beta | | |
| 1 | (Constant) | | -40.670 | 0.000 |
| | Profitabilitas | 0.979 | 36.737 | 0.000 |

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data olah SPSS 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh hasil uji t untuk variabel pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan menghasilkan nilai thitung = 36,737 dan nilai ttabel = 1,671, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $=36,737 > 1,671$ dan nilai signifikan dari variabel pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan yang didapat adalah 0,000 artinya lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0,05 atau $0,000 < 0,05$ maka H_a diterima, dengan kata lain menerima dugaan yang menyatakan bahwa variabel pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (X) berpengaruh terhadap variabel Ppendapatan asli daerah (Y).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap data yang diperoleh oleh peneliti dapat disimpulkan yaitu apabila dilihat secara keseluruhan berdasarkan hasil data yang didapat dan diolah dari pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah yang ada di Kota Bandung, ketidakmampuan pencapain target dari tahun ke tahun yang berasal dari kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai rasio paling rendah tahun 2017 sebesar 1% dengan kriteria sangat kurang, nilai maksimal sebesar 24% dengan kriteria sedang dan rata-rata sebesar 9% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2018 nilai paling rendah sebesar 2% dengan kriteria sangat kurang, nilai maksimal sebesar 64%

dengan kriteria sangat baik dan nilai rata-rata sebesar 16% dengan kriteria kurang. Pada tahun 2019 nilai minimal sebesar 2% dengan kriteria sangat kurang, nilai maksimal sebesar 59% dengan kriteria sangat baik dan nilai rata-rata sebesar 18% dengan kriteria kurang. Pada tahun 2020 nilai minimal sebesar 1% dengan kriteria sangat kurang, nilai maksimal yang dihasilkan sebesar 60% dengan kriteria sangat baik dan nilai rata-rata sebesar 21% dengan kriteria sedang. Dan pada tahun 2021 nilai rasio paling rendah sebesar 3% dengan kriteria sangat kurang, nilai maksimal sebesar 65% dengan kriteria sangat baik dan nilai rata-rata yang didapat sebesar 18% dengan kriteria kurang. Sehingga jika ditotalkan rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah hanya menghasilkan rasio sebesar 16% dengan kriteria kurang. Hal tersebut dikarenakan kurang optimalnya pemungutan disetiap pajak daerah, kemudian kontribusi pendapatan asli daerah tidak hanya dihasilkan dari pajak daerah saja tetapi ada juga yang dihasilkan dari retribusi daerah dan yang lainnya. Diketahui hasil korelasi bahwa koefisien PBB-P2 (X) dan PAD (Y) memiliki nilai positif yaitu sebesar 0,952 yang artinya kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah dengan kriteria korelasi sangat kuat. Dengan kata lain jika variabel PBB- P2 mengalami peningkatan maka variabel PAD juga akan mengalami peningkatan juga. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X (PBB-P2) terhadap variabel Y (PAD). Hal ini dapat terlihat dengan nilai thitung lebih besar daripada ttabel yaitu sebesar $36,737 > 1,671$ dan nilai signifikan dari variabel X yang didapat adalah 0,000 artinya lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0,05 atau $0,000 < 0,05$ maka H_0 diterima, dengan kata lain menerima dugaan yang menyatakan bahwa variabel PBB-P2 (X) berpengaruh terhadap variabel PAD (Y). Adapun saran yang dapat di sampaikan yaitu pemerintah kota Bandung hendaknya lebih meningkatkan lagi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) agar terus bisa mencapai target. 2. Penambahan jumlah personil lapangan sebagai pengawas untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan Kota Bandung. Diharapkan untuk tahun selanjutnya pemerintah Bandung dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak daerah yang dipungut oleh dinas pendapatan daerah dapat lebih ditingkatkan lagi setiap tahunnya dan perlu meningkatkan kinerja pelayanan petugas pada saat menerima pajak Bumi dan Bangunan dari wajib

pajak, hal ini untuk menghindari wajib pajak mempunyai sikap malas untuk membayar pajak karena pelayanan yang kurang baik dari petugas pajak yang dapat berdampak pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2013). Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta
- Oktaviani, M & Verdania, D L. (2022). Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut.
- Pemerintah Kota Bandung. (2016). Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016. Tentang Pajak Daerah.
- Pemerintah Kota Bandung. (2021). Peraturan Wali Kota Bandung No 22 Tahun 2021. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- Riza *et al.* Siwu. 2016. Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah kota Tomohon".Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 02
- Raudhatun, W & Wida, F. (2017). Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Aceh Besar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No. 3, 2017 Hal 10-17
- Sumarsan, T. (2009). Perpajakan Indonesia, Edisi terjemahan. Jakarta Erlangga
- Samudra, A, A. (2015). Perpajakan Indonesia, Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah . Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Rachman, F, R & Terawati, M, T. (2022). *Panduan Penyusunan LTA*. Yogyakarta: Cetak Buku. ID.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.